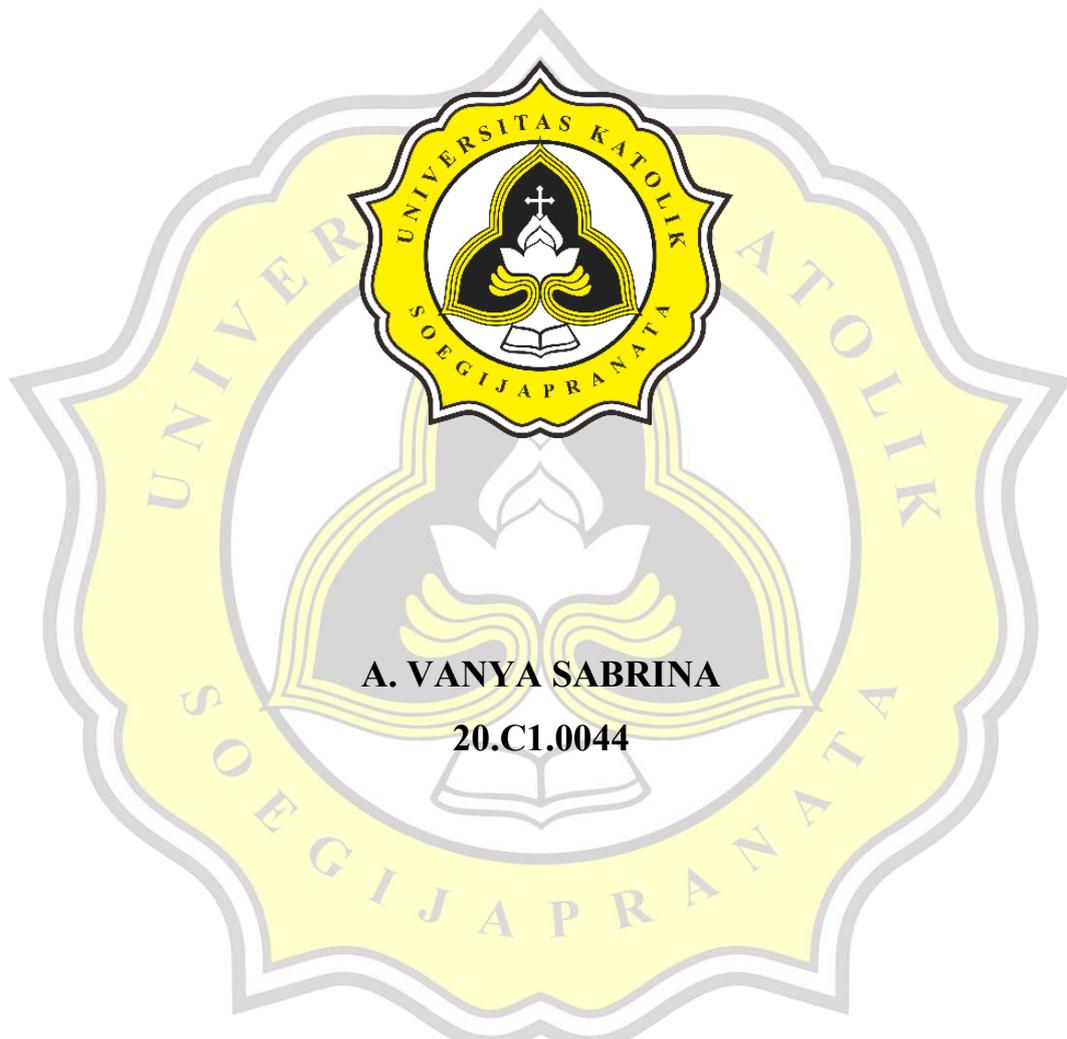


LAPORAN SKRIPSI
KEBIJAKAN LEGISLATIF PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEREDARAN GANJA DI KALANGAN MASYARAKAT



A. VANYA SABRINA

20.C1.0044

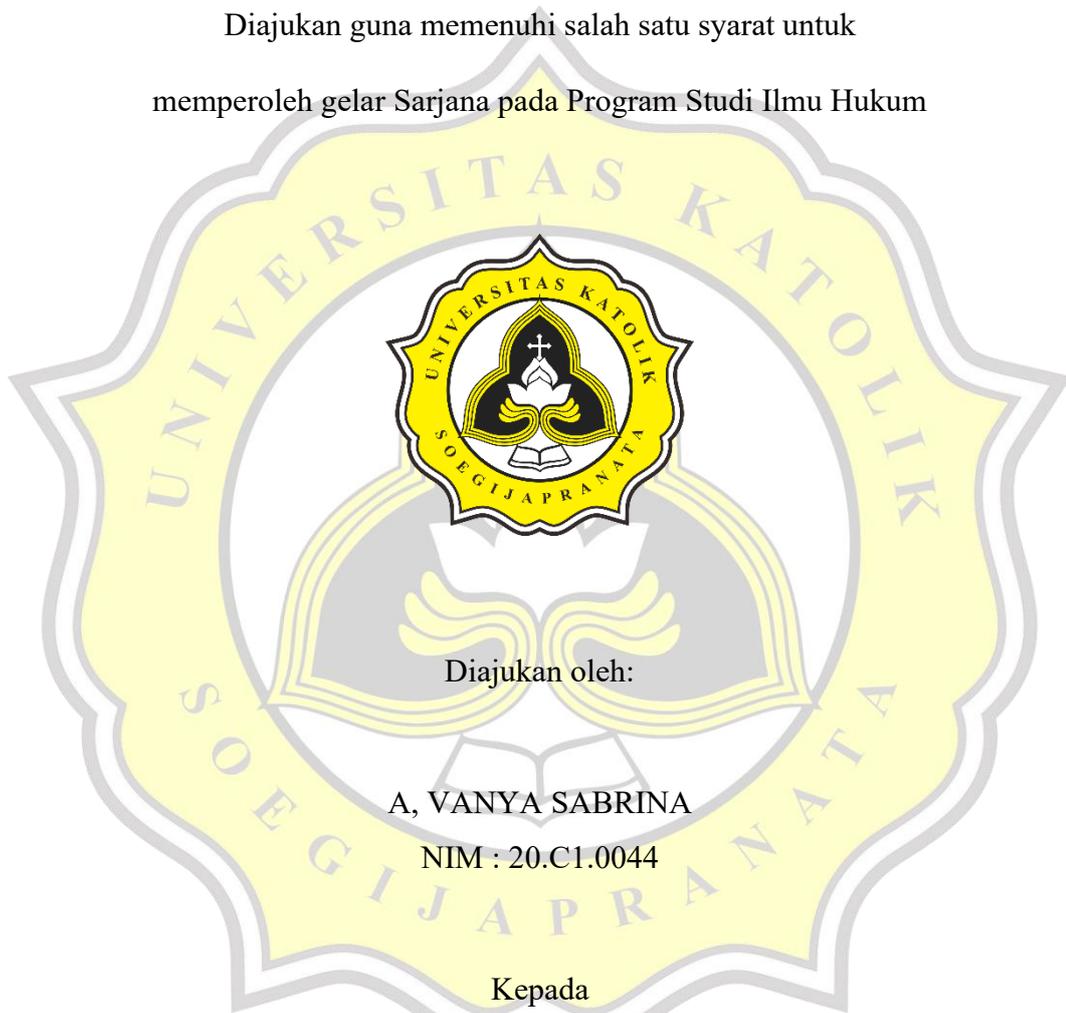
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

**KEBIJAKAN LEGISLATIF PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEREDARAN GANJA DI KALANGAN MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

A, VANYA SABRINA

NIM : 20.C1.0044

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Kebijakan Legislatif Penegakan Hukum Dalam Peredaran Ganja di Kalangan Masyarakat”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap peredaran ganja di kalangan masyarakat, dan untuk mengetahui faktor yang mendasari kebijakan legislatif terhadap pelarangan peredaran ganja dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran ganja di kalangan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Objek penelitian seluruh informasi tentang kebijakan legislatif peredaran ganja di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu dengan melakukan wawancara dan studi pustaka.

Ganja merupakan Narkotika Golongan 1 yang peredaran dan penggunaannya dilarang keras oleh pemerintah yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, ganja diketahui dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan medis. Namun dengan dilarangnya peredaran dan penggunaan ganja yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan ganja untuk medis tidak memungkinkan. Peredaran ganja di kalangan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh penyalahguna narkotika. Penyalahgunaan ganja menimbulkan pandangan negatif yang dimana sebetulnya ganja dapat digunakan untuk pengobatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor alasan peredaran ganja masih dilarang yaitu tingginya kandungan zat negatif pada ganja, formulasi kebijakan peredaran ganja di kalangan masyarakat dan melindungi masyarakat dari bahaya yang diakibatkan penyalahgunaan ganja. Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terkait peredaran ganja yaitu variasi peredaran ganja yang menggunakan beragam metode dan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan narkotika serta stigma negatif terhadap pengguna narkotika juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih humanis dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata kunci : Kebijakan Legislatif, Penegakan Hukum, Peredaran Ganja, Masyarakat.